

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) DPMPD
TAHUN 2021**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan selama satu tahun anggaran. Perubahan Rencana Kerja SKPD mempunyai fungsi yang sangat penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena merupakan perencanaan pada unit organisasi terkecil yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD dan RPJMD. Rencana Kerja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunaanya.

Demi tercapainya kesempurnaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri ini, maka sangat diharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak. Semoga Rencana Kerja SKPD bermanfaat dan dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari aparatur SKPD sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat.

Kediri, - - 2021

**KEPALA DPMPD
KABUPATEN KEDIRI**



D. SAMPURNO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640223 199203 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Lata Belakang	
1.2. Landasan Hukum	
1.3. Maksud dan Tujuan	
1.4. Sistematika Penulisan	
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Laludan CapaianRenstraSKPD	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	
2.3 Isu-isu Penting PenyelenggaraanTugas Dan Fungsi SKPD	
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPDP	
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA	40
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD	
3.3 Program dan Kegiatan	
BAB IV PENUTUP	48

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri menyusun Rencana Kerja Tahun 2021. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor xx Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2021, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tahun 2021

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 ini memuat Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri . Sistematika Renja Perubahan Tahun 2021 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja DPMPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja DPMPD Tahun 2021

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPD Tahun 2020 dan perkiraan pencapaian tahun 2021, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPMPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja DPMPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan DPMPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan , penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para stakeholders yang terkait langsung dengan pelayanan

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsional DPMPD

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DPMPD

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusuan program dan kegiatan

3.4 Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD

BAB. IV PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPD Tahun 2020 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2021 sehingga teridentifikasi sampai sejauh mana DPMPD melaksanakan program dan kegiatannya.

Untuk pelaksanaan Renja Tahun 2020 pada umumnya realisasi program dan kegiatan telah tercapai sesuai target kinerja yang telah direalisasikan.

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2021 diperkirakan bahwa program dan kegiatannya akan sesuai dengan target rencana.

Pencapaian kinerja Tahun 2020 serta perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2021 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target kinerja tahunan dalam Rencana Strategis DPMPD Tahun 2021 – 2026, dikarenakan Rencana Kerja Tahun 2021 masih dalam tahun berjalan, Untuk lebih jelasnya uraian mengenai evaluasi pelaksanaan Renja DPMPD Tahun 2020 dan capaian Renstra periode 2021 – 2026 akan disajikan dalam tabel berikut :

Dukungan anggaran kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Sebelum Perubahan APBD dari 4 (empat) Program , 10 (sepuluh) kegiatan dan 43 (Empat Puluh Tiga) Sub kegiatan total anggaran Rp. 38.679.658.496,- .Dalam Perubahan APBD terdiri dari 4 (empat) program, 10(sepuluh) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) Sub kegiatan , total anggaran adalah Rp 38.742.685.350,- .

Berdasarkan Alokasi Anggaran Tahun 2020, realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Alokasi Dana Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. **4.234.758.500,-** dari jumlah tersebut dana yang direalisasikan sebesar Rp. **3.142.219.560,-** atau **74,20%**, sedangkan realisasi untuk Belanja Langsung sebesar Rp. **5.752.806.000,-** jumlah tersebut dana yang direalisasikan sebesar Rp. **5.082.709.955,-** atau **88,35%** sedangkan realisasi program dan kegiatan dapat dirinci sebagai berikut :

**Anggaran dan Realisasi
BELANJA LANGSUNG dan TIDAK LANGSUNG DPMPD KABUPATEN KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	582.526.000	579.732.155	99,52
1	Pelaksanaan administrasi perkantoran	400.650.000	397.896.293	99,31
2	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	181.876.000	181.835.862	99,98

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	198.329.000	185.653.161	93,61
3	Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	198.329.000	185.653.161	93,61

III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0
	4 Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur	0	0	0
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	60.985.800	60.952.000	99,94
	5 Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	60.985.800	60.952.000	99,94
V	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1.479.803.000	1.376.607.264	93,03
	6 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Derajat Kesehatan, Peningkatan Sarana Prasarana dan Teknologi Tepat Guna (TTG)	165.000.000	136.415.220	82,68
	7 Fasilitasi Kegiatan Sosial Budaya Masyarakat Desa	1.031.240.000	1.027.101.000	75,15
	8 Operasional Pemberdayaan Masyarakat	283.563.000	213.091.044	57,38
VI	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	843.700.000	484.084.256	54,36
	9 Fasilitasi Pelaksanaan Usaha Ekonomi Masyarakat	720.000.000	391.362.800	54,36
	10 Fasilitasi Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa	123.700.000	92.721.456	74,96
VII	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1.079.816.000	1.048.692.905	97,12
	11 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	36.830.000	36.377.505	98,77
	12 Bulan Bakti Gotong-royong Masyarakat	1.946.000	1.946.000	100,00
	13 Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan	34.820.000	31.611.500	90,79
	14 Pendampingan Pembentukan Kawasan Perdesaan	23.000.000	19.865.000	86,37
	15 Penunjang Program Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pemberdayaan Masyarakat	915.355.000	900.251.000	98,35
	16 Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Penguatan Kapasitas SDM	32.200.000	28.004.500	86,97
	17 Penyusunan Profil Desa	35.665.000	30.637.400	85,90
VIII	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	1.305.244.200	1.163.067.214	89,11
	18 Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pemerintah Desa	910.423.218	851.253.700	93,50
	20 Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa	61.111.000	49.694.000	81,32
	21 Pemecahan Dusun, Tuka Menukar Tanah Kas Desa, Pengambilan Materiil dan/atau Alih Fungsi Tanah Kas Desa	34.991.000	24.236.000	69,26
	22 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati	39.381.000	30.735.000	78,05

	23 Penunjang Pajak dan Retribusi Daerah	53.366.000	42.619.000	79,86
	24 Penunjang bantuan keuangan khusus	93.170.732	75.785.264	81,34
	25 Pembinaan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa	112.801.250	88.744.250	78,67
IX	Program pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa	202.402.000	183.921.000	90,87
	26 Penyusunan pedoman, sistem dan prosedur keuangan desa	77.052.000	68.982.000	89,53

	27	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa	84.537.000	78.531.000	92,90
	28	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	40.813.000	36.408.000	89,21
		BELANJA LANGSUNG	5.752.806.000	5.082.709.955	88,35
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.234.758.500	3.142.219.560	74,20
		TOTAL BELANJA	9.987.564.500	8.224.929.515	83,30

A. KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa

a. Tujuan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah :
 “Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan ”

b. Sasaran

Adapun Sasarannya adalah sebagai berikut sebagaimana tabel berikut :

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase BUMDes yang aktif	9,3 (32 BUMDes yang aktif)	$\frac{66}{343} \times 100\%$	19,2 %
	Persentase / Penurunan Desa Tertinggal	Jumlah desa tertinggal 107 desa (target menurunkan 2 desa tertinggal)	Jumlah desa tertinggal 4 desa (terrealisasi 103 desa)	>100%

Pada Tahun 2020 kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Persentase BUMDes yang aktif dari target 9,3 % (32 desa) dapat terealisasi 19,2 % (66 desa) maka capaiankinerjanya lebih dari 100 % .

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan kegiatannya Fasilitasi Pelaksanaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan untuk tahun anggaran 2019 plafonnya sebesar Rp. 1.045.000.000 dimana anggaran tersebut untuk kegiatan pelatihan UMKM, fasilitasi BUMDes dan Pasar Desa, serta untuk memfasilitasi kegiatan pasca PNPM Mandiri Pedesaan.

2. Sasaran Persentase/Penurunan Desa Tertinggal dari target jumlah desa tertinggal menjadi 107 desa bisa terealisasi jumlah desa tertinggal menjadi 4 desa sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor : 201 Tahun 2019 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Nomor 030 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, sehingga target penurunan jumlah desa tertinggal 2 desa untuk tahun 2019 terealisasi 103 desa tertinggal. Untuk mendukung tercapainya sasaran untuk mengurangi Desa Tertinggal DPMPD Kabupaten Kediri hanya memfasilitasi kegiatan tersebut (didukung oleh Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan kegiatannya Fasilitasi Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa) sedangkan status dari desa merupakan keputusan terakhir ada Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia .

c. Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa dengan anggaran sebesar Rp. 1.00479.803.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.376.607.264,- atau 93,03 % dengan indikator program yaitu persentase cakupan layanan pemberdayaan masyarakat dengan target 92 % dan terealisasi sebesar 92 % sehingga capaian indikator program sebesar 100 %

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

1) Pemberdayaan masyarakat melalui derajat kesehatan, peningkatan sarana prasarana dan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Dengan anggaran Rp. 165.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 136.415.220 atau sebesar 82,68 % dengan indikator kegiatan yaitu :

- Jumlah lomba TTG dengan target 1 kegiatan dan realisasi 1 kegiatan
- Jumlah desa penerima program partisipatif masyarakat dengan target 217 desa dan realisasi sebanyak 217 desa

Permasalahan

1. Untuk kegiatan pemberian Bantuan Program Partisipatif Masyarakat Desa, dikarenakan sasaran penerima

program adalah Desa-Desa yang melunasi PBB-P2 Tahun 2020 lebih awal baik Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan, sedangkan dalam pelaksanaan pelunasan PBB-P2 tidak dapat tepat waktu, sehingga pemberian Bantuan Program Partisipatif Masyarakat Desa tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

2. Kegiatan Lomba Inovasi Cipta Karya Teknologi Tepat Guna Tahun 2020

Solusi

1. Sosialisasi yang lebih intensif dan penambahan jumlah hadiah yang diberikan kepada masyarakat/Wajib Pajak, sehingga dapat merangsang masyarakat/Wajib Pajak untuk segera melunasi PBB-P2. Serta penambahan pemberian Bantuan Program Partisipatif Masyarakat Desa kepada Desa-Desa yang melunasi PBB-P2 lebih awal baik Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan baik jumlah Desa sasaran maupun nominal bantuan yang diterima.
2. Menambah media untuk pengumuman Lomba Inovasi Cipta Karya Teknologi Tepat Guna, sehingga semakin banyak masyarakat yang mengetahui akan adanya Lomba dan menambah hadiah bagi Juara Lomba dengan harapan dapat menarik minat masyarakat untuk mengikuti lomba .

2) Fasilitasi kegiatan sosial budaya masyarakat desa

Dengan anggaran Rp. 1.031.240.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.027.101.000 atau sebesar 99,60 % dengan indikator kegiatan yaitu :

- Jumlah kelompok SPAMS yang difasilitasi dengan target 39 kelompok dan realisasi sebanyak 59 kelompok

- Jumlah RTM yang dibantu program P2LDT dengan target 600 RTM (sebelum PAK APBD) dan 1500 RTM (setelah PAK APBD 2019) dan realisasi 1500 RTM
- Jumlah sosialisasi SPAMS dengan target 2 kali dan realisasi sebanyak 2 kali

Permasalahan

1. Untuk mewujudkan rumah yang layak huni dan memenuhi standart kesehatan bukanlah hal yang mudah. Diantara yang menyebabkan besarnya jumlah rumah layakhuni yang ada di Kabupaten Kediri adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan lingkungan sehingga menyebabkan usaha untuk menguranginya tidak dapat dilakukan dengan cepat.
2. Keterbatasan kemampuan Pengurus SPAMS Perdesaan dan kurangnya dukungan dari Pemerintah Desa sehingga kebutuhan air bersih masih ada yang belum tercukupi.

Solusi

1. Meningkatkan kerjasama dengan SKPD terkait dan komponen masyarakat melalui Sosialisasi Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) sebelum kegiatan dilaksanakan. Serta memonitoring dan mengevaluasi setelah kegiatan dilaksanakan.
2. Melaksanakan Monitoring dan Pelatihan bagi Kepala Desa dan Pengurus Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) Perdesaan yang ada di Kabupaten Kediri.

3) Operasional pemberdayaan masyarakat.

Dengan anggaran Rp. 283.563.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 213.091.044,- atau sebesar 75,15 % dengan indikator kegiatan yaitu :

- Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan TP PKK-nya dengan target 343 Desa dan realisasi 343 Desa
- Jumlah kecamatan yang difasilitasi kegiatan TP PKK-nya dengan target 26 Kecamatan dan realisasi 26 Kecamatan

PERMASALAHAN

1. Masih adanya Pengurus TP. PKK Desa yang kurang aktif dalam kegiatan PKK.
2. Kurangnya koordinasi antara Pengurus TP. PKK Desa dengan Aparat Pemerintah Desa sehingga pelaksanaan program dan kegiatan PKK di desa kurang maksimal.

SOLUSI

TP PKK Kabupaten Kediri dan TP PKK Kecamatan secara terus menerus memberikan pembinaan, sosialisasi dan memberikan pelatihan-pelatihan kemandirian yang bekerja sama dengan SKPD terkait sehingga dapat menambah pengetahuan kader PKK yang ada di desa.

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

dengan anggaran sebesar Rp. 843.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 484.084.256,- atau 57,38 % dengan indikator program yaitu persentase pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dengan target 80 % dan terealisasi sebesar 80 % sehingga capaian indikator program sebesar 100 %

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

1) Fasilitasi pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat ;

Dengan anggaran Rp. 720.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 391.362.800,- atau sebesar 54,36 % dengan indikator kegiatan yaitu :

- Jumlah BUMDes yang aktif dengan target 32 BUMDes dan realisasi 66 BUMDes
- Jumlah kecamatan ex penerima PNPM MP dengan target 22 Kecamatan dan realisasi 22 Kecamatan
- Jumlah pelatihan UMKM dengan target 50 pelatihan dan realisasi 14 pelatihan

PERMASALAHAN

Sedikitnya waktu perencanaan dan pelaksanaan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal

SOLUSI

Pelaksanaan tahun anggaran 2020 akan dilakukan lebih terencana baik terkait anggaran maupun pelaksanaannya.

2) Fasilitasi pelaksanaan bantuan pembangunan desa.

Dengan anggaran Rp. 123.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 92.721.456 atau sebesar 74,96 % dengan indikator kegiatan yaitu :

- Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan TP PKK-nya dengan target 343 Desa dan realisasi 343 Desa
- Jumlah kecamatan yang difasilitasi kegiatan TP PKK-nya dengan target 26 Kecamatan dan realisasi 26 Kecamatan

Permasalahan :

- APBDesa terlambat ditetapkan.
- Izin alih fungsi lahan belum turun di tahun anggaran berjalan.
- Kegiatan dan SPJ pencairan sebelumnya belum selesai.

Solusi :

- Akan dilakukan pembinaan terhadap Desa-desanya berdasarkan pemetaan masalah sebagaimana tersebut dalam permasalahan.

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dengan anggaran sebesar Rp. 1.079.816.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.048.692.905,- atau 97,12 % dengan indikator program yaitu persentase partisipasi masyarakat dengan target 95 % dan terealisasi sebesar sehingga capaian indikator program sebesar %

Program tersebut didukung oleh 7 kegiatan yaitu :

1) Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa ;

Dengan anggaran Rp. 36.830.000 dan terealisasi sebesar Rp. 36.377.505,- atau sebesar 98,77 % dengan indikator kegiatan yaitu :

- Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbangdes dengan target 343 Desa dan realisasi 343 Desa

PERMASALAHAN :

Masih ada desa-desa yang belum memahami proses perencanaan pembangunan desa

SOLUSI :

Mengadakan monitoring dan pembinaan secara berkelanjutan bersama dengan pendamping desa terkait proses perencanaan pembangunan desa

2) Bulan Bakti Gotong-royong Masyarakat ;

Dengan anggaran Rp. 1.946.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.946.000,- atau sebesar 100 % dengan indikator kegiatan yaitu :

- Jumlah desa yang melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dengan target 343 Desa dan realisasi 343 Desa

- Keikutsertaan dalam Puncak Peringatan BBGRM Tingkat Provinsi dan pameran.
- Terlaksananya Pencanaan BBGRM Tingkat Kabupaten.

3) **Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan ;**

Dengan anggaran Rp. 34.820.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.611.500 atau sebesar 90,79 % dengan indikator kegiatan yaitu :

- Jumlah desa yang mengikuti lomba desa dengan target 4 Desa dan realisasi - Desa
- Terelesaiannya evaluasi diri di tingkat Desa/Kelurahan target 343 desa dan realisasi 343 desa
- Terelesaiannya hasil penilaian tingkat perkembangan desa/kelurahan dalam kategori Desa/Kelurahan Cepat Berkembang, Berkembang dan Kurang Berkembang, serta pemeringkatan di tingkat Kecamatan
- Terelesaiannya hasil penilaian tingkat perkembangan desa/kelurahan dalam kategori Desa/Kelurahan Cepat Berkembang, Berkembang dan Kurang Berkembang, serta pemeringkatan di tingkat Kabupaten untuk selanjutnya dikirim ke Provinsi target 343 desa dan terealisasi 343 desa

SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah Pemerintah Desa/Kelurahan se-Kabupaten Kediri.

TARGET :

- Terelesaiannya evaluasi diri di tingkat Desa/Kelurahan.
- Terelesaiannya hasil penilaian tingkat perkembangan desa/kelurahan dalam kategori Desa/Kelurahan Cepat Berkembang, Berkembang dan Kurang Berkembang, serta pemeringkatan di tingkat Kecamatan

- o terselesaikannya hasil penilaian tingkat perkembangan desa/kelurahan dalam kategori Desa/Kelurahan Cepat Berkembang, Berkembang dan Kurang Berkembang, serta pemeringkatan di tingkat Kabupaten untuk selanjutnya dikirim ke Provinsi.

REALISASI :

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan terealisasi di 344 Desa/Kelurahan, sedangkan Lomba Desa tidak dilaksanakan karena sudah ada Anugerah Desa.

4) Pendampingan Pembentukan Kawasan Perdesaan ;

Dengan anggaran Rp. 23.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.865.000,- atau sebesar 86,37 % dengan indikator kegiatan yaitu :

- Jumlah kawasan pedesaan yang terbentuk dengan target 1 kawasan dan realisasi - kawasan

SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah Desa yang memiliki lokasi Kawasan Perdesaan

TARGET :

Terbentuknya suatu Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kediri

REALISASI :

Belum terbentuk Kawasan Perdesaan

PERMASALAHAN :

Belum terpenuhinya salah satu persyaratan yaitu belum terbentuknya Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten

SOLUSI :

Tahun 2020 membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

5) Penunjang Program Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pemberdayaan Masyarakat ;

Dengan anggaran Rp. 915.355.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 900.251.000,- atau sebesar 98,35 % dengan indikator kegiatan yaitu :

- Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan Jalin Matra-nya dengan target 45 Desa dan realisasi 44 Desa

SASARAN

Masyarakat yang belum beruntung secara ekonomi, sosial budaya berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) 2015 dengan memperhatikan data PPFM 2018 dengan status kesejahteraan 30% terendah.

6) Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Penguatan Kapasitas SDM ;

Dengan anggaran Rp. 32.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.004.500,- atau sebesar 86,97 % dengan indikator kegiatan yaitu :

- Jumlah kecamatan dalam kegiatan penguatan kapasitas SDM dengan target 26 kecamatan dan realisasi 26 kecamatan
- Jumlah LPMD yang difasilitasi dalam lembaga kemasyarakatan dengan target 343 desa dan realisasi 343 desa

SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah pengurus LPMD di Kabupaten Kediri

TARGET :

Meningkatnya pemahaman para pengurus LPMD terkait tugas pokok dan fungsinya dalam proses pembangunan di desa.

7) Penyusunan Profil Desa.

Dengan anggaran Rp. 35.665.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.637.400,- atau sebesar 85,90 % dengan indikator kegiatan yaitu :

- Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan Profil Desa dengan target 343 Desa dan realisasi 343 Desa

SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah Pengelola Profil Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dan Desa-desa/Kelurahan, terutama yang belum menyelesaikan updating data Profil Desa/Kelurahan Tahun 2019 di website Kemendagri.

TARGET :

Terupdatenya data Profil Desa/Kelurahan di 344 Desa/Kelurahan di Kabupaten Kediri Tahun 2019.

4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

dengan anggaran sebesar Rp. 1.305.244.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.163.067.214,- atau 89,11 % dengan indikator program yaitu persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan target 90 % dan terealisasi sebesar 90 % sehingga capaian indikator program 100 sebesar %

Program tersebut didukung oleh 8 kegiatan yaitu :

1) Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pemerintah Desa

Dengan anggaran Rp. 910.423.218,- dan terealisasi sebesar Rp. 851.253.700,- atau sebesar 93,50 % dengan indikator kegiatan yaitu :

- Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan penyelenggaraan dan pemerintah desa dengan target 343 Desa dan realisasi 343 Desa
- Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan pembentukan BPD dengan target 343 Desa dan realisasi 343 Desa
- Jumlah publikasi desa award dengan target 1 kali dan realisasi 1 kali

2) Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa

Dengan anggaran Rp. 61.111.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.694.000 atau sebesar 81,32 % dengan indikator kegiatan yaitu :

- Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan TP Pkevaluasi dan klarifikasi peraturan desa-nya dengan target 343 Desa dan realisasi 343 Desa

3) Pemecahan Dusun, Tuka Menukar Tanah Kas Desa, Pengambilan Materiil dan/atau Alih Fungsi Tanah Kas Desa

Dengan anggaran Rp. 34.991.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.236.000,- atau sebesar 69,26 % dengan indikator kegiatan yaitu :

- Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan Pemecahan Dusun, Tuka Menukar Tanah Kas Desa, Pengambilan Materiil dan/atau Alih Fungsi Tanah Kas Desa -nya dengan target 5 Desa dan realisasi 1 Desa

Permasalahan :

masih banyak desa desa yang mengajukan proses alih fungsi tanah kas desa terkendala pada Perda RTRW karena tidak sesuai peruntukannya.

Solusi :

agar desa desa yang mengajukan proses alih fungsi TKD menyesuaikan dengan Perda RT / RW Kabupaten Kediri.

4) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati

Dengan anggaran Rp. 39.381.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.735.000,- atau sebesar 78,05 % dengan indikator kegiatan yaitu :

- Jumlah peraturan bupati yang disusun dengan target 1 perbup dan realisasi 5 perbup

5) Penunjang Pajak dan Retribusi Daerah

Dengan anggaran Rp. 53.366.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 75.785.264,- atau sebesar 79,86 % dengan indikator kegiatan yaitu :

- Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan pajak dan retribusinya dengan target 343 Desa dan realisasi 343 Desa

Permasalahan :

Penyerapan terkendala Jadwal/waktu

Solusi :

Pengaturan jadwal agar disesuaikan lebih awal

6) Penunjang bantuan keuangan khusus

Dengan anggaran Rp. 93.170.732,- dan terealisasi sebesar Rp. 75.785.264,- atau sebesar 81,34 % dengan indikator kegiatan yaitu :

- Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan penunjang bantuan keuangan khusus-nya dengan target 343 Desa dan realisasi 343 Desa

Permasalahan :

Penyerapan terkendala Jadwal/waktu

Solusi :

Pengaturan jadwal agar disesuaikan lebih awal

7) Pembinaan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.

Dengan anggaran Rp. 112.801.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 88.744.250,- atau sebesar 78,67 % dengan indikator kegiatan yaitu :

- Jumlah orang (Kades, Sekdes dan BPD) yang mengikuti pembinaan tata kelola pemerintahan desa dengan target 1.029 orang dan realisasi 1.029 orang

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Desa

dengan anggaran sebesar Rp. 202.402.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 183.921.000,- atau 90,87 % dengan indikator program yaitu persentase pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa dengan target 95 % dan terealisasi sebesar 95 % sehingga capaian indikator program sebesar 100 %

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

1) Penyusunan pedoman, sistem dan prosedur keuangan desa

Dengan anggaran Rp. 77.052.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 68.982.000,- atau sebesar 89,53 % dengan indikator kegiatan yaitu :

- Jumlah buku pedoman, sistem dan prosedur keuangan desayang dicetak dengan target 400 buku dan realisasi 400 buku

2) Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa

Dengan anggaran Rp. 84.537.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 78.531.000,- atau sebesar 87,90 % dengan indikator kegiatan yaitu :

- Jumlah tenaga IT desa yang mengikuti bimtek dengan target 343 orang dan realisasi 343 orang

3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Dengan anggaran Rp. 1040.813.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.408.000,- atau sebesar 89,21 % dengan indikator kegiatan yaitu :

- Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan pelaksanaan APBDes-nya dengan target 343 Desa dan realisasi 343 Desa

d. Permasalahan dan Solusi

1. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

1.1 Permasalahan

- Pemahaman masyarakat dan pemerintahan desa berkaitan dengan aturan hukum yang mengatur desa masih minim ;
- Masih banya jumlah masyarakat kurang mampu yang belum terdata dan tertampung dalam program pemerintah

1.2 Solusi

- Melakukan monitoring dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya perencanaan pembanguna desa ;
- Perlu adanya pendatan ulang untuk masyaraat miskin.
- Perlu diadakan pendataan ulang untuk masyarakat miskin sehingga bantuan bisa tepat sasaran

2. Bidang Sosial Budaya, SDA dan TTG

2.1 Kegiatan Pemberdayaan masyarakat melalui derajat kesehatan, peningkatan sarana prasarana dan Teknologi Tepat Guna (TTG) ;

PERMASALAHAN

1. Untuk kegiatan pemberian Bantuan Program Partisipatif Masyarakat Desa, dikarenakan sasaran penerima program adalah Desa-Desa yang melunasi PBB-P2 Tahun 2019 lebih awal baik Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan, sedangkan dalam pelaksanaan pelunasan PBB-P2 tidak dapat tepat waktu, sehingga pemberian Bantuan Program Partisipatif Masyarakat Desa tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal.
2. Kegiatan Lomba Inovasi Cipta Karya Teknologi Tepat Guna Tahun 2019 baru pertama kali dilaksanakan sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan ada sebagian yang belum berani untuk mengikuti lomba dikarenakan tidak memiliki pengalaman untuk mengikuti lomba.

SOLUSI

1. Sosialisasi yang lebih intensif dan penambahan jumlah hadiah yang diberikan kepada masyarakat / Wajib Pajak, sehingga dapat merangsang masyarakat / Wajib Pajak untuk segera melunasi PBB-P2. Serta penambahan pemberian Bantuan Program Partisipatif Masyarakat Desa kepada Desa-Desa yang melunasi PBB-P2 lebih awal baik Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan baik jumlah Desa sasaran maupun nominal bantuan yang diterima.
2. Menambah media untuk pengumuman Lomba Inovasi Cipta Karya Teknologi Tepat Guna, sehingga semakin banyak masyarakat yang mengetahui akan adanya Lomba dan menambah hadiah bagi Juara Lomba dengan harapan dapat menarik minat masyarakat untuk mengikuti lomba .

2.2 Kegiatan Fasilitasi kegiatan sosial budaya masyarakat desa

PERMASALAHAN

1. Untuk mewujudkan rumah yang layak huni dan memenuhi standart kesehatan bukanlah hal yang

mudah. Diantara yang menyebabkan besarnya jumlah rumah layakhuni yang ada di Kabupaten Kediri adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan lingkungan sehingga menyebabkan usaha untuk menguranginya tidak dapat dilakukan dengan cepat.

2. Keterbatasan kemampuan Pengurus SPAMS Perdesaan dan kurangnya dukungan dari Pemerintah Desa sehingga kebutuhan air bersih masih ada yang belum tercukupi.

SOLUSI

1. Meningkatkan kerjasama dengan SKPD terkait dan komponen masyarakat melalui Sosialisasi Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) sebelum kegiatan dilaksanakan. Serta memonitoring dan mengevaluasi setelah kegiatan dilaksanakan.
2. Melaksanakan Monitoring dan Pelatihan bagi Kepala Desa dan Pengurus Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) Perdesaan yang ada di Kabupaten Kediri.

2.3 Kegiatan Operasional pemberdayaan masyarakat.

PERMASALAHAN

1. Masih adanya Pengurus TP. PKK Desa yang kurang aktif dalam kegiatan PKK.
2. Kurangnya koordinasi antara Pengurus TP. PKK Desa dengan Aparat Pemerintah Desa sehingga pelaksanaan program dan kegiatan PKK di desa kurang maksimal.

SOLUSI

TP PKK Kabupaten Kediri dan TP PKK Kecamatan secara terus menerus memberikan pembinaan, sosialisasi dan memberikan pelatihan-pelatihan kemandirian yang bekerja sama dengan SKPD terkait sehingga dapat menambah pengetahuan kader PKK yang ada di desa.

3. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

3.1 Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat ;

PERMASALAHAN

Sedikitnya waktu perencanaan dan pelaksanaan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal

SOLUSI

Pelaksanaan tahun anggaran 2020 akan dilakukan lebih terencana baik terkait anggaran maupun pelaksanaannya.

3.2 Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan bantuan pembangunan desa.

Adapun kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

1. Sub kegiatan Rapat Koordinasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2019.
2. Sub kegiatan Fasilitasi dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2019.
3. Sub kegiatan Monitoring pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Dari 3 (tiga) sub kegiatan tersebut dapat disimpulkan, yaitu :

Permasalahan :

- APBDesa terlambat ditetapkan.
- Izin alih fungsi lahan belum turun di tahun anggaran berjalan.
- Kegiatan dan SPJ pencairan sebelumnya belum selesai.

Solusi :

- Akan dilakukan pembinaan terhadap Desa-desa berdasarkan pemetaan masalah sebagaimana tersebut dalam permasalahan.

4. Bidang Pemerintahan Desa.

a. Permasalahan

Kurangnya profesionalisme dan SDM di desa, baik itu dari unsur Pemerintah Desa maupun lembaga desa lainnya.

Belum terlaksananya Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM) sesuai Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa

b. Pemecahan Masalah

Meningkatkan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa melalui bimbingan teknis dan pelatihan tentang tata kelola pemerintahan desa.

Memberdayakan tenaga administrasi yang ada di desa secara optimal dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat

e. Penghargaan Nasional yang diterima

Nihil

B. KINERJA PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH

Misi 10 : Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban system pendataan dan pemberdayaan masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan

Tujuan : Meningkatkan kualitas masyarakat menuju masyarakat partisipatif dengan pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja		
			2017	2018	2019
Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase BUMDes yang aktif	Persentase			
	a. Target		4,6	6,9	9,3
	b. Realisasi		19,6	42,52	19,2
	c. Capaian (b : a)		426,1 %	616,2 %	206,5 %
	Persentase / Penurunan Desa Tertinggal	Jumlah			
	a. Target		111	109	107
	b. Realisasi		113	23	4
c. Capaian (b : a)		98,23 %	473,9 %	3738,3%	

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Rencana Tindak Lanjut

Dari uraian data tersebut di atas, maka gambaran evaluasi dan analisis capaian kinerja hasil pengukuran kinerja sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

3. Sasaran Persentase BUMDes yang aktif dari target 9,3 % (32 desa) dapat terealisasi 19,2 % (66 desa) maka capaiankinerjanya lebih dari 100 % .

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan kegiatannya Fasilitasi Pelaksanaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan untuk tahun anggaran 2019 plafonnya sebesar Rp. 1.045.000.000 dimana anggaran tersebut untuk kegiatan pelatihan UMKM, fasilitasi BUMDes dan Pasar Desa, serta untuk memfasilitasi kegiatan pasca PNPM Mandiri Pedesaan.

4. Sasaran Persentase/Penurunan Desa Tertinggal dari target jumlah desa tertinggal menjadi 107 desa bisa terealisasi menjadi 4 desa tertinggal sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor : 201 Tahun 2019 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 030 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

Untuk mendukung tercapainya sasaran untuk mengurangi Desa Tertinggal DPMPD Kabupaten Kediri hanya memfasilitasi kegiatan tersebut (didukung oleh Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan kegiatannya Fasilitasi Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa) sedangkan status dari desa merupakan keputusan terakhir ada Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia .

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa (DPMPD) merupakan salah satu Badan yang tugas dan fungsinya membidangi pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan institusi dan pemberdayaan masyarakat desa yang merupakan peleburan dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bagian Pemerintahan Desa.

Pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang disahkan pada tanggal 15 September 2016 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri.

II.2.1 Kedudukan

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang disahkan pada tanggal 15 September 2016 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri

II.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II.2.3 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas,
2. Sekretaris,
 - ◆ Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
 - ◆ Kepala Sub Bagian Keuangan
 - ◆ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
 - ◆ Kepala Seksi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
 - ◆ Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat
- d. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Bantuan Desa
 - ◆ Kepala Seksi Bantuan Pembangunan Desa
 - ◆ Kepala Seksi Ekonomi Masyarakat
- e. Kepala Bidang Pemerintahan Desa

- ◆ Kepala Seksi Pengembangan Pendapatan dan Kekayaan Desa
 - ◆ Kepala Seksi Aparatur Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa dan Adat
 - Kepala Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa
- f. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya, Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- ◆ Kepala Seksi Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat
 - ◆ Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
- g. Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kediri sebagaimana terlampir.

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri ada beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi yaitu :

Aspek permasalahan dan hambatan yang dihadapi dari dalam merupakan Faktor Internal yaitu :

1. Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia yang mendukung upaya pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri belum memadai.
2. Terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Kediri menyediakan anggaran dalam mendukung program-program yang ada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD)
Kabupaten Kediri

4. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri dalam mendukung keseluruhan program dibidang pemberdayaan masyarakat. Hal ini mengingat bahwa tugas, fungsi dan tanggung jawab pemberdayaan masyarakat tidak semata-mata berada pada pemerintah pusat tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
4. Koordinasi pembangunan yang dilaksanakan pada berbagai instansi terkait dalam kegiatan berdimensi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri masih lemah, terlihat masih tumpang tindih program.
5. Terbatasnya kapasitas pemerintah daerah ditunjukkan dari kurangnya pemahaman dan keterampilan pegawai dibidang–bidang tugas yang membutuhkan keahlian khusus, minimnya penguasaan teknologi juga menjadi satu keterbatasan, mengingat penguasaan teknologi informasi menjadi prasyarat dasar bagi peningkatan pengetahuan dan efektifitas serta efisiensi kerja.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran yang belum optimal dan ruang perkantoran yang kurang memadai, padahal manfaatnya besar untuk menunjang kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan usia alat/barang, maka kualitasnya pun semakin menurun sehingga banyak dibutuhkan penggantian dan/atau pemeliharaan.

Aspek permasalahan dan hambatan yang dihadapi dari luar merupakan Faktor Eksternal yaitu :

1. Salah satu penyebab kegagalan kebijakan dan program dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah lemahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dimana :

- Kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa relative masih rendah kemampuan dan ketrampilan pengurus lembaga kemasyarakatan belum merata pada seluruh anggota pengurus.
 - Rendahnya motivasi masyarakat untuk diperankan sebagai lembaga kemasyarakatan
 - Keberadaan lembaga perekonomian desa belum berfungsi secara maksimal
 - Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) perangkat desa
 - Masih kurangnya aparatur desa yang ahli/kompeten dibidangnya
2. Basis data yang valid guna menunjang pengambilan keputusan dirasakan masih lemah. Selain basis data yang masih lemah, aksesibilitas terhadap data juga cukup sulit. Masyarakat masih sulit mengakses data dan informasi pembangunan yang pada akhirnya berdampak kepada distribusi pembangunan yang tidak tepat sasaran dan minimnya partisipasi masyarakat untuk mendukung dan terlibat dalam pembangunan daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. RKPD merupakan pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). RKPD tersusun melalui beberapa mekanisme perencanaan yaitu melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota termasuk Forum Perangkat Daerah (Forum PD).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan usulan dari kegiatan Musrenbang yang terkait dengan usulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri ke dalam rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri.

Dari hasil Forum PD dilakukan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana kerja RKPD bagi setiap PD. Dalam keadaan terdapat usulan masyarakat yang mendesak dan belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap PD yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD. Sehingga rancangan RKPD merupakan integrasi dan harmonisasi antara rancangan awal RKPD dengan rancangan RENJA PD yang telah mendapatkan konfirmasi dan review dari setiap PD.

Musrenbang tahunan atau Musrenbang RKPD dan Forum PD berfungsi menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat, serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.

B A B III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

III.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Kediri. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2016-2021 dan RKP Nasional. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Kediri yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

III.2 Tujuan

Sebelum dirumuskan tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja ini, terlebih dahulu kami akan mengungkapkan kembali Tujuan dan Saran DPMPD yang tercantum dalam Rencana Strategis Periode 2016 – 2021 sebagai berikut :

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri adalah “**Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**” dengan Indikator Tujuan :

1. Persentase BUMDes yang aktif
2. Jumlah desa tertinggal.

III.3 Sasaran

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahunan maka DPMPD Kabupaten Kediri menjabarkan dalam suatu sasaran, yang mencakup :

1. Meningkatnya kelompok usaha ekonomi masyarakat ;
2. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ;
3. Meningkatnya kapasitas lembaga desa ;
4. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa.

III.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah merupakan penjabaran dari rencana kegiatan masing-masing PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output).

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebagai berikut :

III.3.1 Program ,Kegiatan, dan Sub Kegiatan

1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dalam pelaksanaannya mencakup kegiatan berikut :

A. Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,dengan Sub kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ;
- Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,dengan Sub kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran

C. Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah,dengan Sub kegiatan:

- Penatausahaan Barang Milik mDaerah pada SKPD ;

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah,dengan Sub kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bnagunan Kantor ;
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,dengan Sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Surat menyurat ;
- Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan listrik;
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,dengan Sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya;

1.2 Program Penataan Desa dengan kegiatannya sebagai berikut :

A. Penyelenggaraan Penataan Desa, dengan Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Tata Wilayah Desa

1.3 Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan kegiatannya Fasilitasi Kerja sama antar Desa , dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

1.4 Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan kegiatannya Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar desa
- Penyelenggaraan pemilihan ,pengangkatan,dan pemberhentian Kepala Desa
- Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- Pembinaan Peningkatan kapasitas anggota BPD
- Fasilitasi Penetapan dan penegasan batas desa
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

1.5 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat dengan kegiatannya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta

Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- Fasilitasi pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat ;
- Fasilitasi pelaksanaan bantuan pembangunan desa.

1.6 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa dengan kegiatannya sebagai berikut :

- Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan sarana prasarana dan teknologi tepat guna (TTG) ;
- Fasilitasi kegiatan sosial budaya masyarakat desa ;
- Operasional pemberdayaan masyarakat.

1.7 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dengan kegiatannya sebagai berikut :

- Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
- Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ;
- Perlombaan Desa/Kelurahan ;
- Pendampingan pembentukan kawasan perdesaan ;
- Penunjang program peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat ;
- Fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan penguatan kapasitas SDM ;
- Penyusunan Profil Desa.

1.8 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan kegiatannya sebagai berikut :

- Fasilitasi penyelenggaraan dan Pemerintah Desa ;
- Evaluasi Peraturan Desa dan LPJ Kepala Desa ;
- Pemecahan dusun, tukar menukar tanah kas desa, pengambilan materiil dan/ atau alih fungsi tanah kas desa

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan peraturan Bupati ;
- Penunjang pajak dan retribusi daerah ;
- Penunjang bantuan keuangan khusus ;
- Pembinaan dan tata kelola pemerintahan desa.

1.9 Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa

- Penyusunan pedoman, system dan prosedur keuangan desa
- Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa ;
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Seluruh program dan kegiatan diatas pada dasarnya mendukung Visi dan Misi Bupati Kediri Periode 2016 – 2021 pada Misi ke 10 yaitu **“Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan”**.

Agar lebih memudahkan dalam menganalisis Program dan Kegiatan serta besaran perkiraan kebutuhan anggarannya berikut tabel rumusan rencana Program dan Kegiatan DPMPD Kabupaten Kediri pada Rencana Kerja :

B A B I V

P E N U T U P

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah pembangunan yang berkesinambungan dan dilaksanakan secara bertahap, sehingga pada dasarnya pembangunan dari suatu tahap merupakan kelanjutan peningkatan dan penyempurnaan dari pembangunan tahap selanjutnya.

Dalam upaya mendorong keberhasilan pembangunan di wilayah Kabupaten Kediri maka pembangunan desa lebih diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa dibiayai dari APBD II, APBD I maupun APBN, didukung juga dari dana swadaya masyarakat dengan meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) merupakan salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat pada khususnya selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diharapkan dapat berjalan dengan lancar, efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Dengan terlaksananya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021, maka pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja PD Tahun 2021 wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana

dapat diantisipasi lebih awal. Dengan demikian diharapkan hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat dengan demikian akan tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya RKPD 2021 memerlukan kaidah pelaksanaan yang menjadi komitmen bagi seluruh *stakeholder* yang berperan dalam pembangunan, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
2. Masyarakat berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.

Kediri, - - 2021

**KEPALA DPMPD
KABUPATEN KEDIRI**

D. SAMPURNO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640223 199203 1 008

BUPATI KEDIRI,

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2021
 DPMPD KABUPATEN KEDIRI

No	Kode			Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				
						5		6		7		8		9		K
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa																
Non Urusan																
2	13	1		Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	[INDIKATOR DISESUAIKAN]		247,237,804,842.00				38,672,878,496.00		1,762,719,933.00		26,481,907,864.00	
2	13	1	2.01	<i>Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah		62,219,634.00				9,619,000.00		3,425,200.00		2,413,800.00	
2	13	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	32,988,890.00		2 dokumen	5,100,000.00	0 dokumen	1,156,200.00	0 dokumen	1,873,800.00	
2	13	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Capaian kinerja	30 dokumen	29,230,744.00		5 dokumen	4,519,000.00	1 dokumen	2,269,000.00	0 dokumen	540,000.00	
2	13	1	2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan	72 laporan	39,254,372,063.00			12 laporan	5,907,967,646.00	laporan	728,282,403.00	laporan	1,521,267,360.00	
2	13	1	2.02	1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	72 laporan	30,873,927,664.00		12 laporan	4,873,032,046.00	3 laporan	669,826,333.00	3 laporan	1,261,044,435.00	
2	13	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai yang difasilitasi	298 orang	4,102,920,518.00		46 orang	603,101,100.00	46 orang	55,256,070.00	46 orang	122,231,925.00	
2	13	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	72 laporan	4,175,510,588.00		12 laporan	416,063,500.00	3 laporan	100,000.00	3 laporan	134,060,000.00	
2	13	1	2.02	5	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	6 laporan	25,873,640.00		1 laporan	4,000,000.00	1 laporan	2,200,000.00	0 laporan	1,800,000.00	
2	13	1	2.02	7	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd	Jumlah laporan keuangan	72 laporan	50,266,013.00		12 laporan	7,771,000.00	3 laporan	900,000.00	3 laporan	1,821,000.00	
2	13	1	2.02	8	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis	6 laporan	25,873,640.00		1 laporan	4,000,000.00	0 laporan	0.00	0 laporan	310,000.00	
2	13	1	2.03	<i>Administrasi barang milik daerah pada SKPD</i>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UsuranPemerintah Daerah	paket	112,873,752.00			paket	17,450,000.00	paket	2,250,000.00	paket	3,300,000.00	

2	13	1	2.03	6	Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah pengurus barang yang difasilitasi	12 orang	112,873,752.00			2 orang	17,450,000.00	2 orang	2,250,000.00	2 orang	3,300,000.00	
2	13	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum	6 paket	362,586,068.00			1 paket	56,054,900.00	1 paket	17,763,350.00	1 paket	3,650,000.00	
2	13	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 paket	17,644,528.00			1 paket	2,727,800.00	1 paket	994,400.00	0 paket	0.00	
2	13	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah penyediaan peralatan	6 paket	90,399,262.00			1 paket	13,975,500.00	1 paket	13,970,950.00	0 paket	0.00	
2	13	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah penyediaan peralatan Rumah Tangga	6 paket	43,278,190.00			1 paket	6,690,700.00	1 paket	850,000.00	0 paket	0.00	
2	13	1	2.06	5	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang	6 paket	34,560,067.00			1 paket	5,342,900.00	1 paket	950,000.00	1 paket	250,000.00	
2	13	1	2.06	6	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	6 paket	43,467,714.00			1 paket	6,720,000.00	1 paket	400,000.00	1 paket	1,000,000.00	
2	13	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 paket	116,431,378.00			1 paket	18,000,000.00	0 paket	0.00	1 paket	1,800,000.00	
2	13	1	2.06	10	Penataasaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah pengelola arsip yang difasilitasi	6 orang	16,804,929.00			1 orang	2,598,000.00	1 orang	598,000.00	1 orang	600,000.00	
2	13	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 paket	337,068,839.00			1 paket	52,110,000.00	1 paket	6,954,521.00	1 paket	7,932,622.00	
2	13	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 paket	16,171,025.00			1 paket	2,500,000.00	1 paket	500,000.00	0 paket	0.00	
2	13	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6 paket	106,987,499.00			1 paket	16,540,000.00	1 paket	1,454,521.00	3 paket	2,172,122.00	
2	13	1	2.08	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 paket	213,910,315.00			1 paket	33,070,000.00	1 paket	5,000,000.00	1 paket	5,760,500.00	
2	13	1	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 paket	721,808,242.00			1 paket	81,589,750.00	1 paket	258,500.00	1 paket	12,939,300.00	
2	13	1	2.09	1	Penyediaan jasa pemeliharaan,Biaya pemeliharaan,dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	6 paket	479,373,857.00			1 paket	74,110,000.00	1 paket	258,500.00	1 paket	12,939,300.00	

2	13	1	2.09	9	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	6 paket	242,434,385.00			1 paket	7,479,750.00	1 paket	0.00	1 paket	0.00	
2	13	2			Program Penataan Desa	Persentase desa yang proses penetapan dalam penataan desa		117,919,112.00				18,230,000.00		0.00		0.00	
2	13	2	2.01		<i>Penyelenggaraan Penataan Desa</i>	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan desa		117,919,112.00				18,230,000.00		0.00		0.00	
2	13	2	2.01	2	Fasilitasi tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Tata Wilayah Desa	240 desa	117,919,112.00			40 desa	18,230,000.00	0 desa		0 desa	0.00	
2	13	3			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase peningkatan kerjasama desa		174,313,944.00				26,948,500.00		0.00		2,145,000.00	
2	13	3	2.01		<i>Fasilitasi kerja sama antar desa</i>	Jumlah kerjasama desa yang dilakukan antar desa dan pihak ketiga		174,313,944.00				26,948,500.00		0.00		2,145,000.00	
2	13	3	2.01	3	Fasilitasi pembangunan kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan perdesaan, Jumlah kerjasama antar desa	6 kawasan	174,313,944.00			1 kawasan	26,948,500.00	0 kawasan	0.00	0 kawasan	2,145,000.00	
2	13	4			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang difasilitasi		195,060,868,463.00				30,261,642,700.00		951,031,659.00		24,037,918,882.00	
2	13	4	2.01		<i>Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa</i>	Jumlah desa yang dibina dalam menjalankan manajemen pemerintahan desa		195,060,868,463.00				30,261,642,700.00		951,031,659.00		24,037,918,882.00	
2	13	4	2.01	1	Fasilitasi Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	2058 desa	1,517,871,889.00			343 desa	389,819,200.00	10 desa	0.00	76desa	10,281,606.00	
2	13	4	2.01	2	Fasilitasi penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	2058 desa	746,001,712.00			343 desa	103,170,000.00	0 desa	0.00	0 desa	24,530,000.00	
2	13	4	2.01	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	2058 desa	161,386,827.00			343 desa	24,950,000.00	0 desa	0.00	50 desa	350,000.00	
2	13	4	2.01	4	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang difasilitasi	2058 desa	181,237,296,324.00			343 desa	28,005,873,000.00	0 desa	940,061,759.00	343 desa	23,907,569,676.00	
2	13	4	2.01	5	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah desa yang difasilitasi	4116 orang	616,633,514.00			686 orang	95,330,000.00	0 orang	0.00	200 orang	26,382,000.00	
2	13	4	2.01	6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah desa	Jumlah desa yang difasilitasi	2058 desa	616,633,514.00			343 desa	83,170,000.00	0 desa	0.00	0 desa	0.00	
2	13	4	2.01	7	Evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	2058 desa	369,482,041.00			343 desa	57,121,000.00	0 desa	0.00	75 desa	3,000,000.00	

2	13	4	2.01	8	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa	Jumlah desa yang difasilitasi	2058 desa	6,004,573,148.00			343 desa	928,292,000.00	5 desa	10,969,900.00	65 desa	26,570,100.00
2	13	4	2.01	9	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah desa yang difasilitasi	2058 desa	68,241,724.00			343 desa	10,550,000.00	0 desa	0.00	15 desa	1,250,000.00
2	13	4	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa	Jumlah desa yang difasilitasi	2058 desa	434,224,356.00			343 desa	67,130,000.00	0 desa	0.00	15 desa	1,750,000.00
2	13	4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan profil desa	Jumlah desa yang difasilitasi	2064 desa/kel	113,197,173.00			344 desa/kel	17,500,000.00	0 desa	0.00	0 desa	0.00
2	13	4	2.01	13	fasilitasi pengelolaan aset desa	Jumlah desa yang difasilitasi	2058 desa	616,633,514.00			343 desa	83,170,000.00	0 desa	0.00	10 desa	1,750,000.00
2	13	4	2.01	14	pembinaan peningkatan kapasitas anggotav BPD	Jumlah desa yang difasilitasi	6174 orang	1,520,367,401.00			1029 orang	235,045,000.00	0 desa	0.00	50 ORG	2,000,000.00
2	13	4	2.01	15	fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah desa yang difasilitasi	2058 desa	746,001,712.00			343 desa	115,330,000.00	0 desa	0.00	15 desa	1,750,000.00
2	13	4	2.01	18	fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah desa yang difasilitasi	2064 desa/kel	292,323,614.00			344 desa/kel	45,192,500.00	0 desa	0.00	350 desa	30,735,500.00
2	13	5			Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif		11,033,774,725.00				2,241,266,000.00		52,754,300.00		890,340,900.00
2	13	5	2.01		Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemerintahan desa dan lembaga adat tingkat daerah kab/kota serat pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota			11,033,774,725.00				2,241,266,000.00		52,754,300.00		890,340,900.00
2	13	5	2.01	2	Fasilitasi Penataan pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang difasilitasi penataan kelembagaannya	240 desa	1,750,433,730.00			40 desa	979,132,000.00	0 desa	5,656,000.00	40 desa	812,295,000.00

2	13	5	2.01	5	fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	2058 desa	2,952,880,859.00			343 desa	456,508,000.00	10 desa	9,267,500.00	20 desa	7,428,500.00	
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah desa yang difasilitasi	255 orang	1,214,750,000.00			30 orang	14,750,000.00	0 orang	0.00	0 orang	0.00	
2	13	5	2.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa yang difasilitasi	2058 desa	562,945,712.00			343 desa	87,030,000.00	0 desa	0.00	0 desa	1,331,000.00	
2	13	5	2.01	8	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa	Jumlah desa yang difasilitasi, Jumlah Kader yang difasilitasi untuk ketentraman, ketertiban, siaga bencana dan bersih narkoba	2058 desa	3,040,689,524.00			343 desa	470,083,000.00	2 desa	35,805,800.00	6 desa	62,043,400.00	
2	13	5	2.01	9	fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah kader pkk kab/kota yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM, Jumlah desa yang difasilitasi		1,512,074,900.00				233,763,000.00		2,025,000.00		7,243,000.00	
								247,237,804,842.00				38,672,878,496.00		1,762,719,933.00		26,481,907,864.00	
TOTAL																	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :					[WAJIB DIISI SKPD]
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :					[WAJIB DIISI SKPD]
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :					[WAJIB DIISI SKPD]
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPd Tahun Berikutnya :					[WAJIB DIISI SKPD]

III	IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
10	11		12 = 8+9+10+11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%		16	17
Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				28,244,627,797.00	73.03			28,244,627,797.00	11.42		DPMPD KAB KEDIRI	
				5,839,000.00	60.70			5,839,000.00	9.38		DPMPD KAB KEDIRI	
				3,030,000.00							DPMPD KAB KEDIRI	
				2,809,000.00							DPMPD KAB KEDIRI	
				2,249,549,763.00	38.08			2,249,549,763.00	5.73		DPMPD KAB KEDIRI	
				1,930,870,768.00							DPMPD KAB KEDIRI	
				177,487,995.00							DPMPD KAB KEDIRI	
				134,160,000.00							DPMPD KAB KEDIRI	
				4,000,000.00							DPMPD KAB KEDIRI	
				2,721,000.00							DPMPD KAB KEDIRI	
				310,000.00							DPMPD KAB KEDIRI	
				5,550,000.00	31.81			5,550,000.00	4.92		DPMPD KAB KEDIRI	

				5,550,000.00							DPMPD KAB KEDIRI	
				-							DPMPD KAB KEDIRI	
				21,413,350.00	38.20			21,413,350.00	5.91		DPMPD KAB KEDIRI	
				994,400.00							DPMPD KAB KEDIRI	
				13,970,950.00							DPMPD KAB KEDIRI	
				850,000.00							DPMPD KAB KEDIRI	
				1,200,000.00							DPMPD KAB KEDIRI	
				1,400,000.00							DPMPD KAB KEDIRI	
				1,800,000.00							DPMPD KAB KEDIRI	
				1,198,000.00							DPMPD KAB KEDIRI	
				14,887,143.00							DPMPD KAB KEDIRI	
				500,000.00							DPMPD KAB KEDIRI	
				3,626,643.00							DPMPD KAB KEDIRI	
				10,760,500.00							DPMPD KAB KEDIRI	
				13,197,800.00							DPMPD KAB KEDIRI	
				13,197,800.00							DPMPD KAB KEDIRI	

				-							DPMPD KAB KEDIRI	
				-	0.00			-	0.00		DPMPD KAB KEDIRI	
				-	0.00			-	0.00		DPMPD KAB KEDIRI	
				-							DPMPD KAB KEDIRI	
				2,145,000.00	7.96			2,145,000.00	1.23		DPMPD KAB KEDIRI	
				2,145,000.00	7.96			2,145,000.00	1.23		DPMPD KAB KEDIRI	
				2,145,000.00				2,145,000.00			DPMPD KAB KEDIRI	
				24,988,950,541.00	82.58			24,988,950,541.00	12.81		DPMPD KAB KEDIRI	
				24,988,950,541.00	82.58			24,988,950,541.00	12.81		DPMPD KAB KEDIRI	
				10,281,606.00	2.64			10,281,606.00	0.68		DPMPD KAB KEDIRI	
				24,530,000.00	23.78			24,530,000.00	3.29		DPMPD KAB KEDIRI	
				350,000.00	1.40			350,000.00	0.22		DPMPD KAB KEDIRI	
				24,847,631,435.00	88.72			24,847,631,435.00	13.71		DPMPD KAB KEDIRI	
				26,382,000.00	27.67			26,382,000.00	4.28		DPMPD KAB KEDIRI	
				-	0.00			-	0.00		DPMPD KAB KEDIRI	
				3,000,000.00	5.25			3,000,000.00	0.81		DPMPD KAB KEDIRI	

				37,540,000.00	4.04			37,540,000.00	0.63		DPMPD KAB KEDIRI	
				1,250,000.00	#REF!			1,250,000.00	11.85		DPMPD KAB KEDIRI	
				1,750,000.00	#REF!			1,750,000.00	2.61		DPMPD KAB KEDIRI	
				-	0.00			-	0.00		DPMPD KAB KEDIRI	
				1,750,000.00	2.10			1,750,000.00	0.28		DPMPD KAB KEDIRI	
				2,000,000.00	0.85			2,000,000.00	0.13		DPMPD KAB KEDIRI	
				1,750,000.00	1.52			1,750,000.00	0.23		DPMPD KAB KEDIRI	
				30,735,500.00	68.01			30,735,500.00	10.51		DPMPD KAB KEDIRI	
				943,095,200.00	42.08			943,095,200.00	8.55		DPMPD KAB KEDIRI	
				943,095,200.00							DPMPD KAB KEDIRI	
				817,951,000.00							DPMPD KAB KEDIRI	

				16,696,000.00							DPMPD KAB KEDIRI	
				-							DPMPD KAB KEDIRI	
				1,331,000.00							DPMPD KAB KEDIRI	
				97,849,200.00							DPMPD KAB KEDIRI	
				9,268,000.00							DPMPD KAB KEDIRI	
											Predikat	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)	
											Predikat	
-		-		28,244,627,797.00	73.03			28,244,627,797.00	11.42			
. RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)											73.03	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)											T	

Kediri, JULI 2021
KEPALA DPMPD KAB KEDIRI

Drs.D.SAMPURNO,MM.
NIP.19640223 199203 1 008

Tabel 2.4

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021
KABUPATEN KEDIRI**

SKPD DPMPD KABUPATEN KEDIRI

NO.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A	URUSAN WAJIB BUKAN LAYANAN DASAR				
I	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
A	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPD	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPD	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPD	Jumlah dokumen Capaian kinerja	5 dokumen	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPD	Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan		
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	DPMPD	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	24 laporan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMPD	Jumlah pegawai yang difasilitasi	46 orang	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	DPMPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	12 laporan	
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir SKPD	DPMPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	1 laporan	

	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd	DPMPD	Jumlah laporan keuangan	12 laporan	
	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	DPMPD	Jumlah laporan prognosis	1 laporan	
C	Administrasi barang milik daerah pada SKPD	DPMPD	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	DPMPD	Jumlah pengurus barang yang difasilitasi	2 orang	
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPD	Jumlah Administrasi Umum		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	DPMPD	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	DPMPD	jumlah penyediaan peralatan	1 paket	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPD	jumlah penyediaan peralatan Rumah Tangga	1 paket	
	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	DPMPD	Jumlah penyediaan barang	1 paket	
	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang undangan	DPMPD	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 paket	
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPD	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 paket	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPD	Jumlah pengelola arsip yang difasilitasi	1 orang	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPD	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPD	Jumlah penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 paket	
	Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber daya air dan listrik	DPMPD	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 paket	

	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DPMPD	Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 unit	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	DPMPD	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	DPMPD	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	6 unit	
	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	DPMPD	Jumlah gedung yang dipelihara	1 unit	
II	Program Penataan Desa	Desa di Kabupaten Kediri	Persentase desa yang proses penetapan dalam penataan desa		
A	Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa di Kabupaten Kediri	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan desa		
1	Fasilitasi tata Wilayah Desa	Desa-desa di Kabupaten Kediri	Jumlah desa yang difasilitasi Tata Wilayah Desa		
III	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Desa di Kabupaten Kediri	Persentase peningkatan kerjasama desa		
A	Fasilitasi kerja sama antar desa	Desa di Kabupaten Kediri	Jumlah kerjasama desa yang dilakukan antar desa dan pihak ketiga		
1	Fasilitasi pembangunan kawasan Perdesaan	Desa di Kabupaten Kediri	Jumlah kawasan perdesaan, Jumlah kerjasama antar desa	1 desa	
IV	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Desa di Kabupaten Kediri	Persentase desa yang difasilitasi		
A	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		Jumlah desa yang dibina dalam menjalankan manajemen pemerintahan desa		
			Jumlah desa yang tertib penatausahaan keuangan dan aset desa		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan BPD yang meningkat kapasitas SDM		

			Jumlah KPM yang memiliki usaha		
			Jumlah BUM Desa yang berkembang dan maju di jatim		
1	Fasilitasi Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	Desa di Kab Kediri	Jumlah desa yang difasilitasi		
2	Fasilitasi penyusunan Produk Hukum Desa	Desa di Kab Kediri	Jumlah desa yang difasilitasi		
3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Desa di Kab Kediri	Jumlah desa yang difasilitasi		
4	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Desa di Kab Kediri	Jumlah desa yang difasilitasi		
5	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Desa di Kab Kediri	Jumlah desa yang difasilitasi		
6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah desa	Desa di Kab Kediri	Jumlah desa yang difasilitasi		
7	Evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa	Desa di Kab Kediri	Jumlah desa yang difasilitasi		
8	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Desa di Kab Kediri	Jumlah desa yang difasilitasi		
9	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Desa di Kab Kediri	Jumlah desa yang difasilitasi		
10	Fasilitasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa	Desa di Kab Kediri	Jumlah desa yang difasilitasi		
11	Fasilitasi Penyusunan profil desa	Desa di Kab Kediri	Jumlah desa yang difasilitasi		
12	fasilitasi pengelolaan aset desa	Desa di Kab Kediri	Jumlah desa yang difasilitasi		
13	pembinaan peningkatan kapasitas anggotav BPD	Desa di Kab Kediri	Jumlah desa yang difasilitasi		
14	fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Desa di Kab Kediri	Jumlah desa yang difasilitasi		
15	fasilitasi evaluasi perkembangan desa derta lomba desa dan kelurahan	Desa di Kab Kediri	Jumlah desa yang difasilitasi		
V	Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat		Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif		
A	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemerintahan desa dan lembaga adat tingkat daerah kab/kota serat pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang difasilitasi		
			Jumlah kader yang terlatih dalam penanganan tangtuh, siaga bencana dan narkoba		
			Jumlah kader PKK yang meningkatkan kapasitas SDM		
			Jumlah produk UEM yang difasilitasi pemasaran online/nihak ketiga		
			Jumlah lembaga pengelola TTG yang difasilitasi		

1	Fasilitasi Penataan pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Desa di Kab Kediri	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang difasilitasi penataan kelembagaannya		
			Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang		
2	fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa	Desa di Kab Kediri	Jumlah desa yang difasilitasi		
3	Fasilitasi Pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Desa di Kab Kediri	Jumlah desa yang difasilitasi		
4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Desa di Kab Kediri	Jumlah desa yang difasilitasi		
5	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan	Desa di Kab Kediri	Jumlah kader yang difasilitasi untuk ketentraman, ketertiban, siaga bencana dan bersih perkotaan		
6	fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Desa di Kab Kediri	Jumlah kader pkk kab/kota yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM		
			Jumlah desa yang difasilitasi		

**Rumusan Rencana Pogram dan Kegiatan SKPD Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Kediri**

Jenis Pengusul : OPD
 Pengusul : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
 Sumber Dana : APBD

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
[01] DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA											
2		Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar									
2	13	Pemberdayaan masyarakat dan desa									
2	13	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
2	13	1	2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah	kel.kampungd alem		DAU			
2	13	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kel.kampungd alem	2 dokumen	5,100,000	DAU	2 dokumen	5,253,000
2	13	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kel.kampungd alem	5 dokumen	4,519,000	DAU	5 dokumen	4,654,570
2	13	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan	kel.kampungd alem					
			1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	kel.kampungd alem	24 laporan	4,773,032,046	DAU	24 laporan	4,916,223,007
			2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai yang difasilitasi	kel.kampungd alem	46 orang	634,301,100	DAU	46 orang	653,330,133

				3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	kel.kampungd alem	12 laporan	645,523,500	DAU		12 laporan	664,889,205
				5	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	kel.kampungd alem	1 laporan	4,000,000	DAU		1 laporan	4,120,000
				7	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd	Jumlah laporan keuangan	kel.kampungd alem	12 laporan	7,771,000	DAU		12 laporan	8,004,130
				8	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis	kel.kampungd alem	1 laporan	4,000,000	DAU		1 laporan	4,120,000
2	13	1	2.03		Administrasi barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	kel.kampungd alem						
				6	Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah pengurus barang yang difasilitasi	kel.kampungd alem	2 orang	17,450,000	DAU		2 orang	17,973,500
2	13	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum	kel.kampungd alem						
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	kel.kampungd alem	1 paket	2,727,800	DAU		1 paket	2,809,634
				2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah penyediaan peralatan	kel.kampungd alem	1 paket	13,975,500	DAU		1 paket	14,394,765
				3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah penyediaan peralatan Rumah Tangga	kel.kampungd alem	1 paket	6,690,700	DAU		1 paket	6,891,421
				5	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang	kel.kampungd alem	1 paket	5,342,900	DAU		1 paket	5,503,187
				6	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	kel.kampungd alem	12 paket	6,720,000	DAU		12 paket	6,921,600
				9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kel.kampungd alem	12 paket	18,000,000	DAU		12 paket	18,540,000
				10	Penatausaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah pengelola arsip yang difasilitasi	kel.kampungd alem	1 orang	2,598,000	DAU		1 orang	2,675,940
2	13	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kel.kampungd alem						
				1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan Jasa Surat Menyurat	kel.kampungd alem	1 paket	2,500,000	DAU		1 paket	2,575,000
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kel.kampungd alem	1 paket	16,540,000	DAU		1 paket	17,036,200
				3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kel.kampungd alem	20 unit	33,070,000	DAU		20 unit	34,062,100
2	13	1	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	kel.kampungd alem						

				1	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	kel.kampungd alem	6 unit	74,110,000	DAU		6 unit	76,333,300
				9	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	kel.kampungd alem	1 unit	37,479,750	DAU		1 unit	38,604,143
2	13	2			Program Penataan Desa	Persentase desa yang proses penetapan dalam penataan desa							
2	13	2	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan desa							
2	13	2	2.01	2	Fasilitasi tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Tata Wilayah Desa	Desa di kab Kediri		18,230,000	DAU			18,776,900
2	13	3			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase peningkatan kerjasama desa							
2	13	3	2.01		Fasilitasi kerja sama antar desa	Jumlah kerjasama desa yang dilakukan antar desa dan pihak ketiga			0				
2	13	3	2.01	3	Fasilitasi pembangunan kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan perdesaan, Jumlah kerjasama antar desa	Desa di kab Kediri	1 desa	26,948,500	DAU		1 desa	27,756,955
2	13	4			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang difasilitasi							
2	13	4	2.01		Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang dibina dalam menjalankan manajemen pemerintahan desa							
						Jumlah desa yang tertib penatausahaan keuangan dan aset desa							
						Jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan BPD yang meningkat kapasitas SDM							
						Jumlah KPM yang memiliki usaha							
						Jumlah BUM Desa yang berkembang dan maju di jatim							
2	13	4	2.01	1	Fasilitasi Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa di kab Kediri		234,659,200	DAU			241,698,976
				2	Fasilitasi penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa di kab Kediri		115,330,000	DAU			118,789,900
				3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa di kab Kediri		24,950,000	DAU			25,698,500
				4	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa di kab Kediri		28,018,833,000	DAU			28,859,397,990
				5	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa di kab Kediri		95,330,000	DAU			98,189,900

				6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa di kab Kediri		95,330,000	DAU		98,189,900
				7	Evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa di kab Kediri		57,121,000	DAU		58,834,630
				8	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa di kab Kediri		928,292,000	DAU		956,140,760
				9	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa di kab Kediri		10,550,000	DAU		10,866,500
				10	Fasilitasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa di kab Kediri		67,130,000	DAU		69,143,900
				11	Fasilitasi Penyusunan profil desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa di kab Kediri		17,500,000	DAU		18,025,000
				13	fasilitasi pengelolaan aset desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa di kab Kediri		95,330,000	DAU		98,189,900
				14	pembinaan peningkatan kapasitas anggotav BPD	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa di kab Kediri		235,045,000	DAU		242,096,350
				15	fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa di kab Kediri		115,330,000	DAU		118,789,900
				18	afasilitasi evaluasi perkembangan desa derta lomba desa dan kelurahan	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa di kab Kediri		45,192,500	DAU		46,548,275
2	13	5			Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif						
2	13	5	2.01		Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemerintahan desa dan lembaga adat tingkat daerah kab/kota serat pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang difasilitasi	Desa di kab Kediri		0	DAU		
						Jumlah kader yang terlatih dalam penanganan trantib, siaga bencana dan narkoba						
						Jumlah kader pkk yang meningkat kapasitas SDM						
						Jumlah produk UEM yang difasilitasi pemasaran online/pihak ketiga						
						Jumlah lembaga pengelola TTG yang difasilitasi						

2	13	5	2.01	2	Fasilitasi Penataan pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang difasilitasi penataan kelembagaannya	Desa di kab Kediri		900,972,000	DAU		928,001,160
						Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang difasilitasi						
				5	fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa di kab Kediri		456,508,000	DAU		470,203,240
				6	Fasilitasi Pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa di kab Kediri		14,750,000	DAU		15,192,500
				7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa di kab Kediri		87,030,000	DAU		89,640,900
				8	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa	Jumlah Kader yang difasilitasi untuk ketentraman, ketertiban, siaga bencana dan bersih narkoba	Desa di kab Kediri		470,083,000	DAU		484,185,490
				9	fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah kader pkk kab/kota yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM	Desa di kab Kediri		233,763,000	DAU		240,775,890
						Jumlah desa yang difasilitasi						
									38,679,658,496			39,840,048,251

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
[01] DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA													
2		Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar											
2	07	Pemberdayaan masyarakat dan desa											
2	07	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran			635,000,000	635,000,000				
2	07	1	01	30	Pelaksanaan administrasi perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi	Kab Kediri	12 bulan	484,000,000	APBD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang baik	12 bulan	484,000,000

2	07	1	01	31	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Kab Kediri	12 bulan	151,000,000	APBD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang baik	12 bulan	151,000,000
2	07	1	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur			120,780,000				120,780,000
2	07	1	02	55	Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	Kab Kediri	12 bulan	120,780,000	APBD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang baik	12 bulan	120,780,000
2	07	1	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya			0				0
2	07	1	05	15	Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab Kediri	12 bulan	0	APBD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang baik	12 bulan	0
2	07	1	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan			33,482,800				33,482,800
2	07	1	06	32	Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Jumlah dokumen dan laporan yang tersusun	Kab Kediri	12 bulan	33,482,800	APBD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang baik	12 bulan	33,482,800
2	07	1	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	Kab Kediri		1,344,713,000	APBD	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		1,344,713,000
2	07	1	15	27	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Derajat Kesehatan, Peningkatan Sarana Prasarana dan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah Desa yang difasilitasi kegiatan bantuan partisipasi masyarakat desa	Kab Kediri	217 desa, 1 kali pameran	17,310,000	APBD	Meningkatnya kapasitas lembaga desa	217 desa, 1 kali pameran	17,310,000
2	07	1	15	28	Fasilitasi Kegiatan Sosial Budaya Masyarakat Desa	Jumlah RTM yang menerima bantuan P2LDT	Kab Kediri	500 RTM, 25 pokmas	1,031,240,000	APBD	Meningkatnya kapasitas lembaga desa	500 RTM, 25 pokmas	1,031,240,000
2	07	1	15	29	Operasional Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan TP-PKK	Kab Kediri	26 Kecamatan, 344 desa/kelurahan	296,163,000	APBD	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	26 Kecamatan, 344 desa/kelurahan	296,163,000
2	07	1	16		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Kab Kediri		975,050,000	APBD			975,050,000
2	07	1	16	06	Fasilitasi Pelaksanaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah desa yang difasilitasi dalam usaha ekonomi masyarakat	Kab Kediri	26 kecamatan	719,340,000	APBD	Meningkatnya kelompok usaha ekonomi masyarakat desa	26 kecamatan	719,340,000
2	07	1	16	09	Fasilitasi Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pelaksanaan bantuan pembangunan desa	Kab Kediri	26 Kecamatan, 343 desa	255,710,000	APBD	Meningkatnya kelompok usaha ekonomi masyarakat desa	26 Kecamatan, 343 desa	255,710,000
2	07	1	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Capaian layanan pemberdayaan masyarakat	Kab Kediri	12 bulan	1,102,593,000	APBD		12 bulan	1,102,593,000
2	07	1	17	02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Perencanaan pembangunan desa	Kab Kediri	26 kecamatan	25,400,000	APBD	Meningkatnya kapasitas lembaga desa	26 kecamatan	25,400,000
2	07	1	17	14	Bulan Bakti Gotong-royong Masyarakat	Jumlah desa yang melaksanakan BBGRM	Kab Kediri	343 desa	107,995,000	APBD	Meningkatnya kapasitas lembaga desa	343 desa	107,995,000

2	07	1	17	32	Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan	Kab Kediri	4 desa	12,850,000	APBD	Meningkatnya kapasitas lembaga desa	4 desa	12,850,000
2	07	1	17	42	Pendampingan Pembentukan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang difasilitasi	Kab Kediri	1 kawasan	27,250,000	APBD	Meningkatnya kapasitas lembaga desa	1 kawasan	27,250,000
2	07	1	17	48	Penunjang Program Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah desa yang difasilitasi	Kab Kediri	44 desa	899,828,000	APBD	Meningkatnya kapasitas lembaga desa	44 desa	899,828,000
2	07	1	17	49	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Penguatan Kapasitas SDM	Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa/ Masyarakat	Kab Kediri	26 Kecamatan	10,400,000	APBD	Meningkatnya kapasitas lembaga desa	26 Kecamatan	10,400,000
2	07	1	17	50	Penyusunan Profil Desa	Tersusunnya Data Profil Desa		344 desa / kelurahan	18,870,000		Meningkatnya kapasitas lembaga desa	344 desa / kelurahan	18,870,000
2	07	1	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Kab Kediri		1,319,886,200	APBD			1,319,886,200
2	07	1	18	05	Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pemerintah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Kabupaten Kediri	26 Kecamatan, 343 desa	986,426,200	APBD	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	26 Kecamatan, 343 desa	986,426,200
2	07	1	18	08	Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa	Jumlah desa yang dievaluasi peraturan desa dan LPJ desa	Kab Kediri	343 desa	34,150,000	APBD	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	343 desa	34,150,000
2	07	1	18	26	Pemecahan Dusun, Tuka Menukar Tanah Kas Desa, Pengambilan Materiil dan/atau Alih Fungsi Tanah Kas Desa	Terlaksananya Pemecahan Dusun, tukar menukar tanah kas desa, Pengambilan Materiil dan/atau Alih Fungsi Tanah Kas Desa	Kab Kediri	1 Perda	62,550,000	APBD	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	1 Perda	62,550,000
2	07	1	18	31	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati	Kab Kediri	7 desa	26,020,000	APBD	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	7 desa	26,020,000
2	07	1	18	33	Penunjang Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penunjang Pajak dan retribusi Daerah		343 desa	32,330,000		Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	343 desa	32,330,000
2	07	1	18	34	Penunjang bantuan keuangan khusus	Terlaksananya Penunjang Bantuan Keuangan Khusus	Kabupaten Kediri	343 desa	98,800,000	APBD	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	343 desa	98,800,000
2	07	1	18	35	Pembinaan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Kab Kediri	343 desa	79,610,000	APBD	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	343 desa	79,610,000
2	07	1	23		Program pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa	Persentase pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa			201,560,000	APBD			201,560,000
2	07	1	23	07	Penyusunan pedoman, sistem dan prosedur keuangan desa	Terlaksananya penyusunan pedoman , sistem dan prosedur keuangan desa	Kab Kediri	400 buku	58,850,000	APBD	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	400 buku	58,850,000

2	07	1	23	09	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab Kediri	343 desa	83,210,000	APBD	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	343 desa	83,210,000
2	07	1	23	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab Kediri	343 desa	59,500,000	APBD	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	343 desa	59,500,000
					Total Anggaran OPD				5,733,065,000				5,733,065,000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021													
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu indikatif			Sumber Dana		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	
	Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar														
	Pemberdayaan masyarakat dan desa														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah			kel.kampungdalem	kel.kampungdalem							DAU	DAU
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah			kel.kampungdalem	kel.kampungdalem	2 dokumen	2 dokumen	5.100,000	5.100,000	0		DAU	DAU
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Capaian kinerja	Jumlah dokumen Capaian kinerja			kel.kampungdalem	kel.kampungdalem	5 dokumen	5 dokumen	4.519,000	4.519,000	0		DAU	DAU
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan	Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan			kel.kampungdalem	kel.kampungdalem					0			
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan			kel.kampungdalem	kel.kampungdalem	24 laporan	24 laporan	4.773.032,046	4.707.177,900	-65.854,146		DAU	DAU
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai yang difasilitasi	Jumlah pegawai yang difasilitasi			kel.kampungdalem	kel.kampungdalem	46 orang	46 orang	634.301,100	585.601,100	-48.700,000		DAU	DAU
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan			kel.kampungdalem	kel.kampungdalem	12 laporan	12 laporan	645.523,500	416.063,500	-229.460,000		DAU	DAU
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD			kel.kampungdalem	kel.kampungdalem	1 laporan	1 laporan	4.000,000	4.000,000	0		DAU	DAU
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd	Jumlah laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan			kel.kampungdalem	kel.kampungdalem	12 laporan	12 laporan	7.771,000	7.771,000	0		DAU	DAU
	Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis	Jumlah laporan prognosis			kel.kampungdalem	kel.kampungdalem	1 laporan	1 laporan	4.000,000	4.000,000	0		DAU	DAU
	Administrasi barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah			kel.kampungdalem	kel.kampungdalem					0			
	Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah pengurus barang yang difasilitasi	Jumlah pengurus barang yang difasilitasi			kel.kampungdalem	kel.kampungdalem	2 orang	2 orang	17.450,000	17.450,000	0		DAU	DAU
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum	Jumlah Administrasi Umum			kel.kampungdalem	kel.kampungdalem					0			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			kel.kampungdalem	kel.kampungdalem	1 paket	1 paket	2.727,800	2.727,800	0		DAU	DAU
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah penyediaan peralatan	jumlah penyediaan peralatan			kel.kampungdalem	kel.kampungdalem	1 paket	1 paket	13.975,500	140.475,500	126.500,000		DAU	DAU
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah penyediaan peralatan Rumah Tangga	jumlah penyediaan peralatan Rumah Tangga			kel.kampungdalem	kel.kampungdalem	1 paket	1 paket	6.690,700	6.690,700	0		DAU	DAU
	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang	Jumlah penyediaan barang			kel.kampungdalem	kel.kampungdalem	1 paket	1 paket	5.342,900	5.342,900	0		DAU	DAU
	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan			kel.kampungdalem	kel.kampungdalem	12 paket	12 paket	6.720,000	6.720,000	0		DAU	DAU
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			kel.kampungdalem	kel.kampungdalem	12 paket	12 paket	18.000,000	18.000,000	0		DAU	DAU
	Penatuaan Arsip Dimanis pada SKPD	Jumlah pengelola arsip yang difasilitasi	Jumlah pengelola arsip yang difasilitasi			kel.kampungdalem	kel.kampungdalem	1 orang	1 orang	2.598,000	2.598,000	0		DAU	DAU
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			kel.kampungdalem	kel.kampungdalem					0			

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan Jasa Surat Menyurat			kel.kampungdalem	kel.kampungdalem	1 paket	1 paket		2,500,000	2,500,000	0	DAU	DAU
	Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			kel.kampungdalem	kel.kampungdalem	1 paket	1 paket		16,540,000	11,540,000	-5,000,000	DAU	DAU
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			kel.kampungdalem	kel.kampungdalem	20 unit	20 unit		33,070,000	33,070,000	0	DAU	DAU
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			kel.kampungdalem	kel.kampungdalem						0		
	Penyediaan jasa pemeliharaan,Biaya pemeliharaan,dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan			kel.kampungdalem	kel.kampungdalem	6 unit	6 unit		74,110,000	74,110,000	0	DAU	DAU
	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	Jumlah gedung yang dipelihara			kel.kampungdalem	kel.kampungdalem	1 unit	1 unit		37,479,750	7,479,750	-30,000,000	DAU	DAU
	Program Penataan Desa	Persentase desa yang proses penetapan dalam penataan desa	Persentase desa yang proses penetapan dalam penataan desa										0		
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan desa										0		
	Fasilitasi tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Tata Wilayah Desa			Desa di kab Kediri	Desa di kab Kediri				18,230,000	6,710,000	-11,520,000	DAU	DAU
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase peningkatan kerjasama desa	Persentase peningkatan kerjasama desa										0		
	Fasilitasi kerja sama antar desa	Jumlah kerjasama desa yang dilakukan antar desa dan pihak ketiga	Jumlah kerjasama desa yang dilakukan antar desa dan pihak ketiga										0		
	Fasilitasi pembangunan kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan perdesaan,Jumlah kerjasama antar desa	Jumlah kawasan perdesaan,Jumlah kerjasama antar desa			Desa di kab Kediri	Desa di kab Kediri	1 desa	1 desa		26,948,500	26,948,500	0	DAU	DAU
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang difasilitasi	Persentase desa yang difasilitasi										0		
	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang dibina dalam menjalankan manajemen pemerintahan desa	Jumlah desa yang dibina dalam menjalankan manajemen pemerintahan desa										0		
		Jumlah desa yang tertib penatausahaan keuangan dan aset desa	Jumlah desa yang tertib penatausahaan keuangan dan aset desa										0		
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan BPD yang meningkat kapasitas SDM	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan BPD yang meningkat kapasitas SDM										0		
		Jumlah KPM yang memiliki usaha	Jumlah KPM yang memiliki usaha										0		
		Jumlah BUM Desa yang berkembang dan maju di jatim	Jumlah BUM Desa yang berkembang dan maju di jatim										0		
	Fasilitasi Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Jumlah desa yang difasilitasi			Desa di kab Kediri	Desa di kab Kediri				234,659,200	406,209,200	171,550,000	DAU	DAU
	Fasilitasi penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Jumlah desa yang difasilitasi			Desa di kab Kediri	Desa di kab Kediri				115,330,000	110,420,000	-4,910,000	DAU	DAU
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Jumlah desa yang difasilitasi			Desa di kab Kediri	Desa di kab Kediri				24,950,000	24,950,000	0	DAU	DAU
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Jumlah desa yang difasilitasi			Desa di kab Kediri	Desa di kab Kediri				28,018,833,000	28,285,150,000	266,317,000	DAU	DAU
	Pembinaan peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Jumlah desa yang difasilitasi			Desa di kab Kediri	Desa di kab Kediri				95,330,000	84,374,200	-10,955,800	DAU	DAU
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Jumlah desa yang difasilitasi			Desa di kab Kediri	Desa di kab Kediri				95,330,000	49,670,000	-45,660,000	DAU	DAU
	Evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Jumlah desa yang difasilitasi			Desa di kab Kediri	Desa di kab Kediri				57,121,000	71,476,000	14,355,000	DAU	DAU
	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Jumlah desa yang difasilitasi			Desa di kab Kediri	Desa di kab Kediri				928,292,000	928,292,000	0	DAU	DAU
	Penyelenggaraan pemilihan,pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Jumlah desa yang difasilitasi			Desa di kab Kediri	Desa di kab Kediri				10,550,000	9,285,000	-1,265,000	DAU	DAU
	Fasilitasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Jumlah desa yang difasilitasi			Desa di kab Kediri	Desa di kab Kediri				67,130,000	39,088,800	-28,041,200	DAU	DAU
	Fasilitasi Penyusunan profil desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Jumlah desa yang difasilitasi			Desa di kab Kediri	Desa di kab Kediri				17,500,000	25,000,000	7,500,000	DAU	DAU
	fasilitasi pengelolaan aset desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Jumlah desa yang difasilitasi			Desa di kab Kediri	Desa di kab Kediri				95,330,000	50,260,000	-45,070,000	DAU	DAU
	pembinaan peningkatan kapasitas anggotav BPD	Jumlah desa yang difasilitasi	Jumlah desa yang difasilitasi			Desa di kab Kediri	Desa di kab Kediri				235,045,000	194,265,000	-40,780,000	DAU	DAU
	fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Jumlah desa yang difasilitasi			Desa di kab Kediri	Desa di kab Kediri				115,330,000	115,330,000	0	DAU	DAU

	afasilitasi evaluasi perkembangan desa derta lumba desa dan kelurahan	Jumlah desa yang difasilitasi	Jumlah desa yang difasilitasi			Desa di kab Kediri	Desa di kab Kediri			45,192,500	45,192,500	0	DAU	DAU
	Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif									0		
	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemerintahan desa dan lembaga adat tingkat daerah kab/kota serat pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang difasilitasi	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang difasilitasi			Desa di kab Kediri	Desa di kab Kediri					0	DAU	DAU
		Jumlah kader yang terlatih dalam penanganan tranitib, siaga bencana dan narkoba	Jumlah kader yang terlatih dalam penanganan tranitib, siaga bencana dan narkoba									0		
		Jumlah kader pkk yang meningkat kapasitas SDM	Jumlah kader pkk yang meningkat kapasitas SDM									0		
		Jumlah produk UEM yang difasilitasi pemasaran online/pihak ketiga	Jumlah produk UEM yang difasilitasi pemasaran online/pihak ketiga									0		
		Jumlah lembaga pengelola TTG yang difasilitasi	Jumlah lembaga pengelola TTG yang difasilitasi									0		
	Fasilitasi Penataan pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan karang	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang difasilitasi penataan kelembagaannya	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang difasilitasi penataan kelembagaannya			Desa di kab Kediri	Desa di kab Kediri			900,972,000	974,993,000	74,021,000	DAU	DAU
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang difasilitasi	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang difasilitasi									0		
	fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Jumlah desa yang difasilitasi			Desa di kab Kediri	Desa di kab Kediri			456,508,000	456,508,000	0	DAU	DAU
	Fasilitasi Pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah desa yang difasilitasi	Jumlah desa yang difasilitasi			Desa di kab Kediri	Desa di kab Kediri			14,750,000	109,750,000	95,000,000	DAU	DAU
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa yang difasilitasi	Jumlah desa yang difasilitasi			Desa di kab Kediri	Desa di kab Kediri			87,030,000	87,030,000	0	DAU	DAU
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa	Jumlah Kader yang difasilitasi untuk ketentraman, ketertiban, siaga bencana dan bersih narkoba	Jumlah Kader yang difasilitasi untuk ketentraman, ketertiban, siaga bencana dan bersih narkoba			Desa di kab Kediri	Desa di kab Kediri			470,083,000	345,083,000	-125,000,000	DAU	DAU
	fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah kader pkk kab/kota yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM	Jumlah kader pkk kab/kota yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM			Desa di kab Kediri	Desa di kab Kediri			233,763,000	233,763,000	0	DAU	DAU
		Jumlah desa yang difasilitasi	Jumlah desa yang difasilitasi											
										38,679,658,496	38,742,685,350	63,026,854		

Kediri , - - 2021
KEPALA DPMPD KAB KEDIRI

Drs.D.SAMPURNO.MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.

